



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MENCEGAH PENIPUAN UMRAH TERULANG KEMBALI

Rohani Budi Prihatin
Analisis Legislatif Ahli Madya
rohani.prihatin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Penipuan penyelenggaraan umrah kembali terulang dan kali ini dilakukan oleh agen perjalanan umrah PT Naila Safaah Wisata Mandiri (NSWM). Penipuan ini mengakibatkan sejumlah jemaah terlantar di Arab Saudi dan mereka sempat tidak bisa pulang ke Indonesia. Kasus ini terkuak usai adanya laporan dari jemaah umrah yang tidak bisa pulang ke Indonesia. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 18 September 2022, di mana 64 jemaah umrah yang batal pulang karena visanya bermasalah. Jemaah ini sempat terlunta-lunta selama sembilan hari di Mekkah karena tidak mendapatkan penjelasan dari agen travel tersebut. Kasus yang melibatkan PT NSWM ini menambah daftar kasus penipuan berkedok travel umrah di Indonesia. Setidaknya telah terjadi lima kasus serupa dalam beberapa tahun terakhir, termasuk yang paling terkenal yakni kasus First Travel dengan kerugian mencapai Rp905 miliar.

Polda Metro Jaya melalui Tim Anti Satgas Mafia Umrah telah berhasil menangkap 3 (tiga) pelaku yakni Mahfudz Abdullah (MA), Halijah Amin (HA), dan Hermansyah Syafiuddin (HS) yang merupakan Direktur Utama PT NSWM. Setelah diselidiki ternyata PT NSWM telah menipu 500 orang dari berbagai daerah dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp 91 miliar. Saat ini, ketiga pelaku tersebut dijerat Pasal 126 juncto Pasal 119 A UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dalam Pasal 126 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Tersangka MA sendiri sebenarnya adalah residivis untuk kasus yang sama pada tahun 2016. Saat itu MA menjabat pimpinan di PT Garuda Angkasa Mandiri (GAM) yang menawarkan paket umrah kepada para korbannya dengan harga berkisar Rp 13-19 juta. Saat itu banyak calon jemaah umrah yang sudah menyetorkan uang untuk umrah, namun gagal berangkat.

Berdasarkan pola penipuan, jika ada agen yang menawarkan harga di bawah harga yang dirilis oleh Kementerian Agama, maka masyarakat perlu waspada dan hati-hati. Selain soal harga yang terlalu murah, cara lain menipu adalah dengan dijanjikan potongan harga jika bisa merekrut jemaah lain atau dengan iming-iming paket wisata lanjutan ke negara lain seperti Uni Emirat Arab atau Turki. Dengan iming-iming itu, jemaah merasa lebih tertarik dengan harga yang lebih murah dan membuat korban tergiur untuk mendaftar umrah di agen perjalanan tersebut. Sementara modus tergolong baru yang dilakukan PT NSWM agar dapat mengirimkan jemaah umrah ke Arab Saudi adalah dengan memalsukan Barcode ID card di Siskopatuh Kemenag RI, dengan cara mencetak QR code menggunakan data jemaah yang sebelumnya pernah berangkat. Dengan menggunakan QR code palsu yang tidak sesuai tersebut maka para jemaah ini bisa lolos proses administrasi dan berangkat umrah. Agar terhindar dari penipuan, masyarakat juga dapat memeriksa perizinan penyelenggara umrah atau haji khusus di kantor-kantor Kementerian Agama setempat. Kementerian Agama memiliki daftar lengkap agen Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang resmi terdaftar dan terjamin layanannya.

Atensi DPR

Sering terjadinya kasus penipuan yang dilakukan oleh agen penyelenggara umrah sudah seharusnya Kementerian Agama antisipatif dan bertindak cepat dalam merespons. Berdasarkan waktu terjadinya kasus penelantaran jemaah umrah yang terjadi pada bulan September 2022 dan waktu penangkapan para pelaku pada akhir Maret 2023 ternyata ada jeda waktu sekian lama. Agar kejadian penipuan ini tidak terjadi atau dapat diminimalisasi di masa depan maka Kementerian Agama dalam hal ini Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Kemenag harus benar-benar melakukan tugasnya dengan memeriksa dan memastikan satu per satu para jemaah umrah agar mereka mendapatkan hak sebagaimana mestinya. DPR RI melalui Komisi VIII perlu melakukan pengawasan kepada Pemerintah agar modus semacam ini tidak terulang di kemudian hari. Beberapa hal yang perlu dilakukan Pemerintah atau Kementerian Agama:

1. Meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap para penyelenggara umrah dan merespon secara cepat setiap kasus penipuan. Kementerian Agama khususnya Subdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Ditjen PHU Kemenag RI, jangan sampai terlambat bertindak.
2. Berkoordinasi secara erat dengan Tim Satgas Anti Mafia Umrah Polda Metro Jaya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bentuk memberikan sanksi yang tegas akan memberi dampak jera bagi pelaku penipuan maupun calon pelaku di kemudian hari.

Sumber

bbc.com, 4 April 2023;
kompas.com, 2 April 2023;
mediaindonesia.com, 30 Maret 2023; dan
Republika, 1 April 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023